



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (20255) pp: 3944-3949

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Proses Pembayaran Vendor Dan Dampaknya Terhadap Kelancaran Operasional Di PT Wisata Jatim Trans Indonesia

Elsha Amalia Salsabila¹, Rachmad Sukma Putranto²

Prodi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya

elshasalsabila03@gmail.com¹, rachmad.sukma@stiemahardhika.ac.id²

Pembayaran vendor yang tepat waktu merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Namun, di PT Wisata Jatim Trans Indonesia, pembayaran vendor sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh pengajuan pembayaran yang terlambat dan adanya banyak hari libur dalam periode tertentu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pembayaran vendor di perusahaan tersebut dan dampaknya terhadap kelancaran operasional. Metode yang digunakan adalah observasi langsung selama magang dan studi kasus pada proses pembayaran vendor. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan dan kalender kerja mempengaruhi jadwal pembayaran, yang kemudian berdampak pada hubungan perusahaan dengan vendor dan potensi gangguan operasional. Disarankan agar perusahaan memperbaiki mekanisme pengajuan dan mengantisipasi pengaruh hari libur untuk menjaga kelancaran pembayaran.

Kata kunci: Pembayaran Vendor, Pengajuan Pembayaran, Kelancaran Operasional

1. Latar Belakang

Berikut ini adalah petunjuk penulisan naskah di Jurnal RIGGS (Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital) yang Pembayaran tepat waktu kepada vendor merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang memiliki dampak langsung terhadap kelancaran operasional sebuah perusahaan. Ketika pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal, perusahaan dapat menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan para pemasoknya. Hubungan yang solid dengan vendor tidak hanya mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan serta memperkuat reputasi perusahaan di mata mitra bisnis. Sebaliknya, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan ketidakpuasan vendor dan menimbulkan risiko gangguan pasokan yang berimbas pada operasional perusahaan. PT Wisata Jatim Trans Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi. Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan transportasi, kelancaran operasional menjadi faktor utama dalam menjamin kepuasan pelanggan dan menjaga daya saing. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan, khususnya terkait pembayaran kepada vendor, harus berjalan secara efektif dan efisien agar seluruh aktivitas bisnis dapat terselenggara tanpa hambatan. Pembayaran yang tepat waktu menjadi bagian integral dari proses manajemen keuangan perusahaan (Febyanti, 2025).

Selama magang di PT Wisata Jatim Trans Indonesia, ditemukan bahwa pembayaran kepada vendor sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Keterlambatan pembayaran ini terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti proses pengajuan pembayaran yang terlambat dan adanya banyak hari libur atau cuti bersama yang mempengaruhi waktu penyelesaian administrasi keuangan. Masalah ini perlu dianalisis secara mendalam agar solusi yang tepat dapat ditemukan dan diterapkan. Proses pengajuan pembayaran yang tidak tepat waktu biasanya berasal dari bagian operasional atau dari pihak vendor sendiri yang belum melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan. Ketidaktepatan waktu ini menyebabkan pembayaran tidak dapat segera diproses oleh bagian keuangan, sehingga akhirnya menunda pencairan dana kepada vendor. Hal ini menunjukkan adanya kendala komunikasi dan koordinasi internal yang perlu diperbaiki agar proses administrasi dapat berjalan lebih lancar dan cepat (Winoto et al., 2024).

Selain pengajuan pembayaran yang terlambat, faktor eksternal lain yang memengaruhi adalah banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama yang jatuh pada periode pembayaran. Hari-hari libur tersebut menyebabkan jeda waktu dalam proses administrasi, mulai dari verifikasi dokumen, persetujuan pembayaran, hingga pencairan dana. Akibatnya, jadwal pembayaran vendor menjadi mundur dari yang direncanakan, yang bisa menimbulkan ketidakpastian bagi vendor dan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kerja sama. Keterlambatan

pembayaran tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan dari pihak vendor, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan bisnis jangka panjang. Vendor yang merasa dirugikan akibat keterlambatan pembayaran mungkin akan menahan pengiriman barang atau jasa, menaikkan harga, atau bahkan mencari mitra bisnis lain yang menawarkan pembayaran lebih cepat. Kondisi ini tentu merugikan perusahaan karena dapat memengaruhi kelancaran operasional dan meningkatkan biaya produksi atau layanan (Islamiyah & Ratnawati, 2024).

Dampak dari keterlambatan pembayaran juga dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dalam bentuk gangguan operasional. Misalnya, keterlambatan pengiriman bahan bakar, suku cadang kendaraan, atau jasa pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan operasional transportasi dan pariwisata. Gangguan ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan, keterlambatan jadwal keberangkatan, dan ketidakpuasan pelanggan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan dan reputasi perusahaan. Manajemen keuangan yang efektif dalam perusahaan seperti PT Wisata Jatim Trans Indonesia tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan, tetapi juga pada pengelolaan arus kas agar pembayaran kepada vendor dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini membutuhkan sistem yang terintegrasi dan prosedur yang jelas, termasuk perencanaan anggaran, pemantauan jadwal pengajuan pembayaran, dan pengelolaan kalender kerja yang mempertimbangkan hari libur. Dengan demikian, perusahaan dapat mengantisipasi kendala yang mungkin muncul dalam proses pembayaran (Anindyanari et al., 2024).

Dengan memahami proses dan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, perusahaan dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki sistem pembayaran vendor. Evaluasi menyeluruh akan membantu menemukan titik lemah dan mengusulkan solusi yang tepat, seperti memperbaiki koordinasi antar bagian, mempercepat proses administrasi, atau mengatur jadwal pembayaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi kalender kerja. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pembayaran vendor di PT Wisata Jatim Trans Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kelancaran operasional perusahaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi proses pembayaran dan menjaga hubungan bisnis yang sehat dengan vendor, sehingga mendukung keberlangsungan bisnis dan pertumbuhan perusahaan ke depannya (Pratiwi et al., 2021).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah observasi langsung selama masa magang di PT Wisata Jatim Trans Indonesia. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara real-time bagaimana proses pembayaran kepada vendor berjalan, mulai dari tahap pengajuan pembayaran, verifikasi dokumen, hingga pencairan dana. Dengan melakukan observasi langsung, penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik dan prosedur yang diterapkan di perusahaan, sekaligus mencatat kendala yang muncul selama proses tersebut. Selain observasi, metode studi kasus juga digunakan untuk fokus pada analisis proses pembayaran vendor secara mendalam. Studi kasus ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen administrasi keuangan yang terkait dengan pembayaran vendor, seperti faktur, nota pengajuan, dan bukti pencairan dana. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelusuri alur proses pembayaran serta mengidentifikasi titik-titik di mana keterlambatan sering terjadi. Data dokumen tersebut dilengkapi dengan wawancara informal dengan beberapa staf keuangan untuk mendapatkan pemahaman lebih detail tentang prosedur dan tantangan yang dihadapi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi pola keterlambatan pembayaran dan menggali faktor-faktor penyebabnya. Penulis menelaah hasil observasi dan dokumen secara komprehensif untuk menemukan hubungan antara berbagai variabel yang berkontribusi terhadap keterlambatan, seperti pengajuan pembayaran yang terlambat dan hari libur yang mempengaruhi jadwal administrasi. Dengan metode ini, artikel dapat menyajikan gambaran holistik mengenai masalah pembayaran vendor di perusahaan serta memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan temuan lapangan (Nasution, 2024).

3. Hasil dan Diskusi

Di PT Wisata Jatim Trans Indonesia, pola pembayaran vendor mengikuti sistem pembayaran di akhir periode, biasanya pada akhir bulan. Sistem ini menuntut pengajuan

pembayaran dilakukan sebelum periode tersebut berakhir agar proses pencairan dana dapat segera diproses. Jika pengajuan pembayaran diterima tepat waktu, maka pembayaran akan dilakukan secara lancar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga arus kas perusahaan tetap stabil sambil memastikan kewajiban terhadap vendor terpenuhi. Namun, sistem pembayaran di akhir periode ini menjadikan perusahaan sangat bergantung pada ketepatan pengajuan dari bagian operasional maupun vendor itu sendiri. Ketergantungan ini menimbulkan risiko, terutama jika terjadi keterlambatan dalam pengajuan dokumen atau proses administrasi lainnya. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang baik antar bagian dan vendor agar proses pembayaran tidak mengalami hambatan. Selain itu, proses verifikasi dokumen pembayaran juga dilakukan dalam waktu yang terbatas menjelang akhir periode. Hal ini kadang menimbulkan tekanan bagi staf keuangan untuk menyelesaikan semua proses administrasi dalam waktu singkat, yang dapat meningkatkan potensi kesalahan dan penundaan. Proses yang tergesa-gesa ini juga berdampak pada efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran. Dalam praktiknya, pola pembayaran yang mengandalkan pengajuan tepat waktu ini juga kurang fleksibel terhadap kondisi dinamis yang terjadi, seperti adanya perubahan jadwal operasional atau adanya hari libur yang mempengaruhi proses administrasi. Akibatnya, sistem ini tidak mampu mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi dan kemungkinan perbaikan pada sistem pembayaran, misalnya dengan mengadopsi sistem pembayaran yang lebih adaptif dan memiliki mekanisme pengingat agar pengajuan pembayaran dilakukan lebih awal. Dengan demikian, risiko keterlambatan dapat diminimalkan dan kelancaran operasional dapat lebih terjamin. Pola pembayaran vendor yang diterapkan di PT Wisata Jatim Trans Indonesia memiliki mekanisme yang jelas, namun sangat tergantung pada koordinasi dan ketepatan pengajuan pembayaran, sehingga perlu adanya perbaikan agar sistem ini lebih responsif terhadap kendala operasional yang muncul (Septiani et al., 2024).

Keterlambatan pembayaran di PT Wisata Jatim Trans Indonesia umumnya disebabkan oleh pengajuan pembayaran yang terlambat dari bagian operasional maupun vendor. Hal ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi internal dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan, seperti faktur dan bukti layanan. Ketidakteraturan ini menyebabkan proses verifikasi dan persetujuan pembayaran tertunda sehingga pembayaran tidak dapat diproses sesuai jadwal. Selain itu, faktor administratif juga berkontribusi pada keterlambatan. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan prosedur mengharuskan adanya pengembalian dan revisi, yang memakan waktu lebih lama dalam proses pembayaran. Kurangnya pemahaman staf operasional atau vendor mengenai prosedur administrasi juga memperparah masalah ini. Faktor eksternal lain yang signifikan adalah adanya banyak hari libur nasional atau cuti bersama dalam bulan tertentu. Hari libur tersebut menyebabkan berkurangnya hari kerja efektif dalam proses administrasi keuangan, sehingga memperlambat tahapan verifikasi dan pencairan dana. Penundaan ini terkadang menyebabkan pembayaran mundur hingga bulan berikutnya. Tidak hanya hari libur, juga ada faktor teknis yang mempengaruhi, seperti keterbatasan sistem informasi keuangan yang kurang terintegrasi. Sistem manual atau semi-digital yang masih digunakan membuat proses pencatatan dan pengajuan lebih lambat dibandingkan dengan sistem otomatisasi yang modern dan terintegrasi. Perbedaan pemahaman dan komunikasi antar bagian operasional, keuangan, dan vendor juga menjadi kendala yang signifikan. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik mengakibatkan ketidakjelasan status pembayaran, yang pada akhirnya memicu keterlambatan dalam proses administrasi. Secara keseluruhan, keterlambatan pembayaran merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Identifikasi dan pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk

merumuskan solusi yang efektif dalam meningkatkan ketepatan pembayaran di perusahaan (Febyanti, 2025).

Keterlambatan pembayaran kepada vendor berdampak negatif pada hubungan bisnis antara PT Wisata Jatim Trans Indonesia dengan para pemasoknya. Vendor yang menerima pembayaran terlambat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja sama. Kepercayaan yang menurun ini berpotensi mengurangi prioritas layanan atau bahkan berisiko hilangnya vendor penting. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Vendor yang merasa tidak dihargai atau dirugikan secara finansial mungkin akan menunda pengiriman atau menurunkan kualitas layanan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Dampak ini menjadi sangat krusial dalam konteks perusahaan pariwisata dan transportasi seperti PT Wisata Jatim Trans Indonesia, di mana kelancaran layanan sangat bergantung pada ketersediaan barang dan jasa dari vendor. Gangguan pada rantai pasok dapat mengakibatkan ketidaksesuaian jadwal operasional, sehingga menurunkan tingkat kepuasan pelanggan dan citra perusahaan di pasar. Lebih jauh, dampak keterlambatan pembayaran juga dapat menyebabkan kerugian finansial tidak langsung, seperti penurunan efisiensi operasional dan biaya tambahan untuk mencari vendor pengganti atau melakukan negosiasi ulang kontrak. Kerugian ini harus diantisipasi dengan memperbaiki sistem pembayaran agar tidak mengulangi masalah yang sama. Dampak psikologis terhadap staf perusahaan juga tidak dapat diabaikan. Tekanan dari vendor dan risiko gangguan operasional dapat meningkatkan stres dan beban kerja karyawan yang menangani proses pembayaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi keterlambatan pembayaran harus menjadi prioritas bagi manajemen perusahaan. Dengan memperbaiki sistem administrasi dan komunikasi, serta meningkatkan koordinasi internal, dampak negatif terhadap operasional dapat diminimalisir sehingga perusahaan mampu menjaga hubungan yang baik dengan vendor sekaligus menjaga kelancaran operasional dan pelayanan kepada pelanggan (Winoto et al., 2024).

PT Wisata Jatim Trans Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki sistem pembayaran vendor agar keterlambatan dapat diminimalkan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah meningkatkan koordinasi antara bagian operasional dan bagian keuangan untuk memastikan pengajuan pembayaran dilakukan tepat waktu. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin dan penggunaan aplikasi komunikasi internal yang mempermudah pertukaran informasi terkait status pengajuan pembayaran. Selain itu, perusahaan mulai menerapkan sistem pengingat otomatis untuk mengingatkan bagian operasional dan vendor terkait tenggat waktu pengajuan dokumen pembayaran. Sistem ini diharapkan dapat mendorong pengajuan lebih awal sehingga bagian keuangan memiliki waktu yang cukup untuk memverifikasi dan memproses pembayaran sebelum akhir periode. Upaya ini juga sekaligus membantu meminimalkan risiko keterlambatan akibat kurangnya perhatian terhadap jadwal. Perusahaan juga melakukan pelatihan internal untuk staf operasional dan keuangan terkait prosedur administrasi pembayaran yang benar dan pentingnya ketepatan waktu. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai proses administrasi, diharapkan pengumpulan dokumen dapat dilakukan secara lengkap dan sesuai standar, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Selain perbaikan internal, PT Wisata Jatim Trans Indonesia berupaya memperbaiki hubungan dengan vendor melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Perusahaan secara rutin menyampaikan perkembangan proses pembayaran dan mendiskusikan kendala yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan dan kerja sama yang baik demi kelancaran operasional bersama. Perusahaan juga

mempertimbangkan penggunaan sistem pembayaran elektronik (e-payment) yang lebih terintegrasi guna mempercepat proses pencairan dana. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Namun, implementasi teknologi ini masih dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Secara keseluruhan, berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen PT Wisata Jatim Trans Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembayaran vendor. Meski demikian, masih diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan (Islamiyah & Ratnawati, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam bisnis berkelanjutan adalah menjaga hubungan jangka panjang yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk vendor. Di PT Wisata Jatim Trans Indonesia, keterlambatan pembayaran kepada vendor tidak hanya berdampak pada hubungan kerja sama, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam rantai pasok. Vendor yang merasa tidak mendapatkan kepastian pembayaran cenderung menurunkan prioritas pelayanan terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu operasi harian perusahaan, khususnya dalam sektor transportasi wisata yang menuntut ketepatan waktu dan kesiapan armada. Ketidaktepatan dalam pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh unit terkait menjadi titik awal masalah. Praktik bisnis berkelanjutan menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam alur administrasi internal. Dengan mengadopsi sistem pengajuan digital yang terintegrasi dan terjadwal secara otomatis, perusahaan dapat memastikan proses pengajuan berjalan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap proses manual yang sering kali terhambat oleh faktor sumber daya manusia dan jadwal libur Panjang (Islamiyah & Ratnawati, 2024).

Hari libur nasional dan cuti bersama turut memengaruhi efektivitas proses pembayaran, karena proses otorisasi dan transfer dana tertunda. Penerapan prinsip keberlanjutan mengharuskan perusahaan untuk membuat *contingency plan* atau rencana antisipasi operasional saat terjadi gangguan eksternal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kalender pembayaran yang mempertimbangkan hari libur nasional dan menyiapkan waktu buffer agar pembayaran tetap dapat dilakukan sebelum vendor mengalami keterlambatan pendanaan operasional mereka. Dari sisi vendor, keterlambatan pembayaran juga berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Sebagai mitra bisnis, vendor memerlukan arus kas yang sehat untuk membayar karyawan, membeli bahan baku, atau melakukan pemeliharaan aset. Ketika arus kas terganggu karena pembayaran dari PT Wisata Jatim Trans Indonesia terlambat, vendor juga akan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, kolaborasi yang adil dan tanggung jawab bersama menjadi bagian integral dari *triple bottom line* bisnis berkelanjutan: profit, people, and planet (Septiani et al., 2024).

Penerapan sistem manajemen vendor berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk memastikan alur komunikasi dan keuangan lebih terstruktur dan efisien. Melalui sistem ini, vendor dapat memantau status pembayaran secara real-time, sementara perusahaan dapat menetapkan tenggat pengajuan dan persetujuan secara digital. Hal ini mendukung akuntabilitas internal dan memperkuat kepercayaan vendor, sehingga operasional dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Sistem seperti ini tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung praktik ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan proses manual. Dengan meningkatkan proses pembayaran dan manajemen vendor berbasis keberlanjutan, PT Wisata Jatim Trans Indonesia tidak hanya menyelesaikan masalah keterlambatan, tetapi juga membangun fondasi untuk operasi yang lebih tangguh dan kolaboratif di masa depan. Bisnis berkelanjutan bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa proses operasional dan

hubungan antar pelaku usaha berlangsung secara adil, efisien, dan tahan terhadap gangguan. Dengan langkah ini, perusahaan dapat mempertahankan reputasi baik dan meningkatkan daya saing jangka panjang di industri transportasi wisata (Winoto et al., 2024).

4. Kesimpulan

Pembayaran vendor yang terlambat di PT Wisata Jatim Trans Indonesia terutama disebabkan oleh pengajuan pembayaran yang tidak tepat waktu dan adanya banyak hari libur yang memperpanjang proses pembayaran. Keterlambatan ini berpengaruh negatif terhadap hubungan dengan vendor dan dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan memperbaiki sistem pengajuan pembayaran dengan meningkatkan koordinasi antar bagian dan merencanakan jadwal pembayaran yang mempertimbangkan hari libur, guna menjaga hubungan baik dengan vendor dan kelancaran operasional. Selain itu, implementasi teknologi informasi seperti sistem pengingat otomatis dan penggunaan sistem pembayaran elektronik perlu dipertimbangkan secara serius untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi pembayaran. Pelatihan berkala bagi staf terkait juga sangat penting untuk memastikan pemahaman dan disiplin dalam menjalankan prosedur pembayaran tepat waktu. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko keterlambatan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Terakhir, perusahaan perlu menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan vendor agar dapat membangun kepercayaan jangka panjang. Hubungan yang harmonis akan mendukung kelancaran kerja sama dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Melalui perbaikan sistem dan hubungan yang lebih baik, PT Wisata Jatim Trans Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang profesional dan dapat diandalkan dalam industri pariwisata dan transportasi.

Referensi

1. Anindyanari, O. S., Puspitasari, N. B., Pma, P., & Risiko, X. Y. Z. (2024). *Analisis dan Mitigasi Risiko Rantai Pasok Menggunakan Metode House of Risk pada PT XYZ Abstrak*.
2. Febyanti, A. (2025). *Peran sistem informasi akuntansi dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan divisi purchasing di PT Semen Indonesia Distributor*. 15.
3. Islamiyah, F. A., & Ratnawati, T. (2024). *INTERNAL AUDIT COSO FRAME WORK UNTUK MENDETEKSI RISIKO TERJADINYA FRAUD PADA BAGIAN OPERASIONAL DI CV DWI BAHARI*. 9(204), 2266–2282.
4. Kusmira, T. (2021). *ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBELIAN TERHADAP KAS PT. WIRATAMA MITRA ABADI*. 1–7.
5. Nasution, S. P. D. (2024). *Analisis Kinerja Rantai Pasok Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Pesanan Pada PT Sentosa Tata Multi Sarana*. 26(2), 368–378.
6. Pannata, D., Tanaka, K., & Luckianto, J. (2024). *Perbandingan Perencanaan Enterprise Manufaktur pada Berbagai Perusahaan Manufaktur*. 2(2), 66–74. <https://doi.org/10.54259/jdmis.v2i2.1897>
7. Pratiwi, E., Parapat, S., Hutagalung, D. S., & Malau, E. I. (2021). *Analisis Prosedur Dan Administrasi Marketing Pada Dealer Mobil Di Pematangsiantar*. 32–36. <https://doi.org/10.55622/jamin.v3i2.423>
8. Septiani, N. K., Ayu, I., Widawati, P., Agung, A., & Septiari, I. M. (2024). *Analisis Prosedur Pembayaran Utang Supplier di Hotel X*. 4(3), 1109–1123.
9. Winoto, E. S., Prihandoko, G., Kusumawardani, N. A., & Qisthani, N. N. (2024). *Evaluasi Kinerja Vendor Berdasarkan Kriteria Vendor Performance Index (VPI) dengan Metode AHP di PT X*.
10. Yulianto, A. (2023). *Analisis kegunaan uang kas dalam kelancaran aktivitas perusahaan*. 1(1).